

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Republik Turki merupakan negara yang berdiri diatas dua benua yaitu Eropa dan Asia. Negara ini bisa dibilang merupakan negara strategis karena berbatasan langsung dengan Laut hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegean di sebelah barat, Georgia berada di timur laut, lalu di sebelah timur adalah Armenia, Azerbaijan, Iran, kemudian Irak dan Suriah berada di tenggara Turki dan Laut Marmara di terletak di selatan. Komposisi penduduk Turki mencakup 70-75% adalah etnis Turki, diikuti sekitar 18% merupakan etnis Kurdi dan 7-12% adalah etnis lainnya atau agama minoritas. Turki adalah negara yang heterogen, terdiri dari kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis termasuk Kurdi, Laz, Çerkes, Roma, Alevi, Syriacs, Arab, Yunani, Armenia, Yahudi dan lain-lain, di samping mayoritas Turki. Suku Kurdi adalah salah satu masyarakat adat dari dataran Mesopotamia dan dataran tinggi, yang sekarang berada di selatan dan timur Turki, utara dan timur Suriah, Irak utara, utara dan barat Iran dan selatan dan barat Armenia. Antara 25 dan 35 juta orang Kurdi menghuni wilayah pegunungan di perbatasan Turki, Irak, Suriah, Iran dan Armenia. Mereka membentuk kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah, tetapi mereka tidak pernah memperoleh negara bangsa yang merdeka. (BBC, 2016, p.1)

Estimasi tiga puluh juta orang Kurdi berada terutama di daerah pegunungan Iran, Irak, Suriah, dan Turki dan sebagai salah satu bangsa terbesar di dunia tanpa negara yang berdaulat. Dan mereka menyebutkan bahwa sebagian besar daerah mereka diduduki oleh etnis Kurdi adalah tanah Kurdi. Dalam empat negara tersebut, Kurdi telah menetapkan berbagai bentuk organisasi dan memisahkan diri dari pemerintahan negara masing-masing. Perpecahan politik membentang di perbatasan di masing-masing negara, beberapa pihak Kurdi dan organisasi membentuk cabang atau aliansi di negara-negara tetangga. Kebanyakan gerakan Kurdi dan partai politik

difokuskan pada kekhawatiran dan otonomi atau kemerdekaan Kurdi di negara-negara mereka. Militan Kurdistan di Turki mendirikan sebuah Organisasi PKK yang berbasis di Irak juga yang diakui sebagai Organisasi Teroris oleh AS, NATO, dan Uni Eropa.

Sepanjang sejarah Republik Turki, kewarganegaraan Turki dan identitasnya telah disamakan dengan keanggotaan mayoritas Muslim Turki dan Sunni. Sistem pendidikan di Turki telah menekankan identitas Turki tunggal untuk semua warga negara dan dihilangkan penyebutan kelompok minoritas yang diakui di tahun 1923. Kemudian orang-orang yang telah menyerukan pengakuan hak-hak minoritas sering menghadapi tuntutan pidana terkait pelanggaran integritas negara. Di bawah pengaruh kiri Turki dan gerakan nasional Kurdi Irak, nasionalisme Kurdi di Turki mulai berkembang pada akhir tahun 1960, dan sangat terlihat pada tahun 1970 dengan jumlah yang sedang berkembang di kelompok budaya dan politik. Setelah kudeta militer September 12, 1980, semua kelompok budaya dan politik nasionalis Kurdi dilarang, bersama dengan kelompok-kelompok kiri dan kanan. Lalu ini menjadikan peluang terbuka untuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebuah kelompok bawah tanah dengan orientasi Marxis-Leninis pada saat itu yang melancarkan perjuangan bersenjata melawan negara Turki pada tahun 1984. Sejak saat itu, militer Turki telah berjuang menanggulangi PKK. Dan sepanjang tahun 1980 dan 90-an PKK berusaha untuk membangun negara Kurdi terpisah. Sekarang kelompok bersenjata ini berjuang untuk hak-hak budaya dan politik untuk Kurdi di Turki. (Anon., 2010, pp. 10-11)

Beberapa tuntutan etnis Kurdi yang di perjuangkan yaitu gerakan Kurdi ingin pendidikan Kurdi penuh yang memungkinkan Kurdi untuk digunakan dalam pendidikan bilingual dari TK seterusnya dan memulai program dukungan negara untuk pelatihan guru dalam bahasa Kurdi. Tapi gerakan Kurdi tidak mencari penghapusan Turki sebagai bahasa resmi. Ia ingin membebaskan penggunaan Kurdi di semua aspek kehidupan masyarakat di daerah yang berbahasa Kurdi, dan pemerintah harus merencanakan cara untuk menemukan tempat sekolah, kota, lapangan dan kehidupan bisnis untuk Kurdi. (Report, 2012, pp. 27-30). Sejak tahun 1980 an suku Kurdi telah melakukan beberapa pergerakan meliputi kegiatan politik

damai untuk menuntut hak-haknya dan melakukan pemberontakan bersenjata dan perang gerilya serta melakukan serangan militer yang mengancam warga sipil dan pangkalan militer Turki untuk menuntut kemerdekaan secara terpisah oleh Turki. Selama 25 tahun terakhir, militer Turki dan Kurdistan Partai Buruh (PKK) telah terkunci dalam konflik di provinsi bagian tenggara dan timur Turki. Pertempuran itu telah menewaskan sekitar 44.000 orang (termasuk anggota PKK, masyarakat sipil dan anggota keamanan negara). Sejak Mei 2010, PKK telah melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap sasaran militer dan polisi. (Sinclair, 2010, pp. 9-11)

Kurdi yang merupakan kelompok minoritas dengan dampak terbesar pada politik nasional di Turki, menyebabkan populasi Kurdi merupakan persepsi sebagai satu-satunya minoritas yang bisa menjadi ancaman bagi persatuan nasional Turki. Jika dilihat dari serangkaian serangan yang dilakukan oleh militan kurdi, ini dapat dikatakan sebagai ancaman militer yang mengancam suatu kedaulatan Negara. Awalnya pemberontakan Kurdi telah ada lebih dari dua dekade sejak zaman kekaisaran ottoman. Lalu pemberontakan ini berlanjut Sejak tahun 1920, suku Kurdi telah membentuk suatu kelompok untuk melakukan serangkaian pemberontakan, diantaranya pemberontakan Koçkiri (1920), pemberontakan Sheikh Kata (1925) lalu pemberontakan Ararat (1930) dan pemberontakan Dersim Rebelliom (1938).

PKK adalah sebuah entitas regional yang didirikan diidentifikasi oleh militer dan kekuatan politik antara gerakan Kurdi dengan pengaruh dan dukungan yang baik oleh Kurdi di bagian Irak, Suriah dan Iran. Lalu Kurdistan membentuk suatu organisasi suatu partai yang berbasis di Iran bernama Iran Kurdistan Free Life Party (PJAK). Meskipun Kurdi memiliki status non-negara Kurdi di Turki, PKK sebagai negosiator resmi antara Kurdi dan Negara Turki sejak tahun 1990-an sampai hari ini. Öcalan selama satu dekade di Suriah, membentuk suatu hubungan hubungan yang berdasarkan kerjasama dengan berafiliasi oleh etnis Kurdi dan membentuk gerakan di Suriah, atau biasa disebut dengan Uni Partai Demokrat (PYD). Mengingat interaksi yang didirikan antara kerjasama PYD dan PKK, PKK berdiri sebagai sebuah parameter yang berpengaruh yang bisa membawa PYD lebih dekat, sehingga kesatuan gerakan Kurdi bisa akhirnya dicapai. Kemudian PKK bisa memberikan

pengaruh positif pada hubungan bersama PYD dan PJAK yang bisa memungkinkan kerjasama lebih lanjut sejauh strategi Kurdi terpadu yang bersangkutan di luar dan di atas perbedaan ideologi. (Zambelis, 2011)

Organisasi PKK dibentuk pada awal tahun 1970 sebagai organisasi revolusioner Marxis-Leninis dengan tujuan pembongkaran sistem politik Turki yang didirikan oleh Abdullah Ocalan. PKK mendirikan organisasi bersama dengan sekelompok 16 siswa. Rasa kekecewaan yang mendalam dengan partai politik sayap kiri di Turki memunculkan ide untuk membentuk PKK sebagai organisasi gerilya militan. Beberapa faktor menciptakan kondisi gelombang politik nasionalis Kurdi yang muncul pada 1960-an dan 1970-an. Beberapa intelektual Kurdi difokuskan pada tiga tujuan utama: Mereka menganjurkan untuk bahasa Kurdi diakui sebagai bahasa resmi di Turki; mereka mendorong untuk Kurdi menerima perwakilan proporsional di parlemen Turki; dan mereka ingin Kurdi untuk mendapatkan hak untuk membangun birokrasi negara Kurdi untuk mengelola rencana pembangunan ekonomi di provinsi tenggara. Namun nyatanya Penekanan politik terhadap Kurdi oleh pemerintahan Turki sebagai tanggapan terhadap Kurdi. Upaya Turki memaksa mengasimilasi Kurdi dengan cara, negara Turki membuat keluarga petani menyekolahkan anak mereka ke sekolah asrama yang dikelola negara sehingga anak-anak Kurdi akan berbicara Turki dan kehilangan keakraban mereka dengan budaya dan adat istiadat Kurdi. Pada tahun 1984 PKK memulai pemberontakan brutal terhadap negara Turki dan diarahkan kampanye pembunuhan terhadap kedua pasukan keamanan dan warga sipil yang dianggap kolaborator dengan negara. Dalam menanggapi ancaman keamanan yang berkembang, Turki dilaksanakannya darurat militer yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas yang dilakukan di kedua sisi terhadap penduduk sipil. (Eccarius-Kelly, 2011, pp. 1-3)

Partai Pekerja Kurdistan (PKK) merupakan kelompok terorisme yang paling menonjol dari pada kelompok-kelompok terorisme lainnya di Turki seperti Pembebasan Partai Rakyat Revolusioner / Front (DHKP-C), seorang Marxis-Leninis kelompok militan dengan pandangan anti-AS dan anti-NATO yang berupaya menggulingkan negara Turki, dan Turki Hizbullah (tidak berhubungan ke grup

bernama sama Hizbullah yang beroperasi di Lebanon). PKK yang terdiri dari etnis Kurdi dengan agenda nasionalis beroperasi dari daerah di Turki tenggara dan Irak utara yang menargetkan pasukan keamanan Turki. Pada tahun 2011 beberapa insiden terorisme telah dilakukan oleh organisasi PKK. PKK terus menunjukkan jangkauan nasionalnya seperti penyerangan pada patroli militer di pedesaan, alat peledak improvisasi (IED) di sepanjang rute militer atau polisi, dan pemboman baik keamanan dan warga sipil di daerah perkotaan. Berikut beberapa serangan yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2011.

- Sebuah serangan Juli di Gendarmerie Personil di Silvan menggunakan senjata ringan dan granat yang menewaskan 13 pasukan keamanan Turki.
- Serangan Agustus di distrik Cukurca provinsi Hakkari meninggalkan setidaknya sembilan personel keamanan Turki tewas.
- Sebuah serangan September di jalan Ankara ramai menggunakan IED berbasis kendaraan kecil menewaskan tiga warga sipil dan melukai 34. PKK membantah memainkan peran dalam serangan itu, meskipun bertanggung jawab atas pengeboman itu diklaim oleh Kurdistan Freedom Falcons (TAK), sebuah organisasi diduga memiliki hubungan dengan PKK.
- Sebuah serangan September di Batman membunuh seorang wanita dan putrinya yang berusia empat tahun ketika penyerang PKK melepaskan tembakan dari kendaraan.
- Dalam serangan Oktober, mematikan sejak 1993, PKK menewaskan 26 pasukan keamanan di provinsi Hakkari. (Anon., 2012)

Lalu untuk mendukung upaya politik dan militer organisasi PYD di Suriah, Kurdi dari Turki, Iran, dan Irak telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan Unit Rakyat Perlindungan (YPG), sebuah organisasi militan Kurdi di bawah milisi PYD. Dalam hal ini mereka menyatukan rasa nasionalisme Kurdi dari masing-masing negara dan telah memberikan kontribusi untuk membangkitkan kekerasan di Turki tenggara, setelah gagalnya sebuah pembicaraan damai pada pertengahan Juli 2015 antara pemerintah Turki dan PKK. Selama periode ini, pasukan keamanan Turki telah melakukan operasi militer di daerah yang mayoritas penduduknya etnis Kurdi

dan diduduki oleh pejuang PKK yang berada di perbatasan Irak, Iran dan Suriah. Untuk saat ini, PYD tetap fokus pada proyek politiknya di dalam wilayah Suriah, yang membutuhkan gencatan senjata antara PKK di Turki. Keberhasilan PYD di Suriah telah mempengaruhi ambisi politik PKK di Turki dan membuat PKK semakin kuat karena adanya dukungan dan keberhasilan PYD di Suriah, ini menjadikan suatu ancaman juga bagi pemerintah Turki terhadap organisasi militan yang berbasis di Irak, Iran dan Suriah. Dalam berbagai serangan-serangan yang terjadi, Pemimpin PKK yang bertanggung jawab untuk 40.000 kematian di Turki, Abdullah Ocalan, terpaksa melarikan diri ke Suriah bersama dengan anggotanya pada 1990-an. Setelah Ocalan tertangkap pada tahun 1999, organisasi ini diserahkan ke dinas intelijen Suriah. Di bawah bimbingan Al-Mukhabarat, Osman Ocalan, yang adalah saudara Abdullah Ocalan serta salah satu komandan senior PKK mendirikan struktur baru bernama PYD [Uni Demokratik Partai] pada tahun 2003.

Sama seperti PKK, yang PYD bertujuan untuk mendirikan sebuah rezim di wilayah Suriah. Oleh karena itu, Kurdi tidak pernah menjadi perhatian utama dari PYD; itu selalu orang-orang Kurdi yang menderita penindasan di tangan kelompok-kelompok teroris. Namun, meskipun ini, Kurdi selalu digunakan sebagai alasan untuk melindungi diri sebagai terorisme yang dilakukan oleh PKK-PYD. Menurut sebuah laporan oleh Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR), di wilayah di bawah kekuasaannya, yang PYD menimbulkan penganiayaan terutama pada Kurdi, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil dan dokumen bahwa selama periode Maret 2011 sampai akhir 2015, cabang militer dari PYD (yang YPG) sewenang-wenang menangkap sedikitnya 651 orang, menewaskan 41 wanita dan 51 anak-anak, dan tegas merekrut 1.876 anak menjadi tentara. Selain itu, dari awal 2014 sampai Oktober 2015, 88 wanita, 34 di antaranya adalah anak-anak, diculik oleh YPG dan sampai akhir 2015, 51 anak-anak dibantai dalam penembakan acak atau dengan penembak jitu. Dalam hal ini PKK juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. PKK telah menghasilkan banyak dana yang mendapatkan dari berbagai aktor. Lalu biaya perbatasan yang dihasilkan oleh PKK, dan pajak Suriah dikumpulkan melalui PYD dengan kata lain, uang yang dimiliki Suriah, sedang

dipindahkan ke Qandil oleh PKK. Selanjutnya di Suriah, PKK dapat dengan mudah memberikan orang dengan pelatihan militer di kamp-kamp untuk masuk dalam anggota PYD dan PKK (Pusane, 2016).

Lalu diikuti dengan berbagai serangan yang terjadi di masing-masing negara yang dilakukan oleh PKK dan PYD dengan dukungan satu sama lain, PJAK juga memiliki peran penting dalam memperkuat PKK di Turki. Kurdistan Free Life Party (PJAK atau biasa disebut PEJAK) yang berbasis di wilayah Kurdi Irak, beberapa mil dari perbatasan Iran yang berada di pegunungan Qandil sepanjang perbatasan Kurdistan Irak dengan Turki dan Iran. Beroperasi di bawah payung keamanan PKK, PJAK mengadopsi banyak ide-ide politik dan strategi militer PKK. Menurut April 3, 2006 artikel di Washington Times, telah melancarkan serangan di sepanjang perbatasan di Iran sejak tahun 2004 atas nama kepentingan Kurdi Iran. Menurut pemerintah Iran pada tahun 2005 PJAK menewaskan sedikitnya 120 tentara Iran di Iran, dan pada tahun 2006 PJAK menyamai total ini. PEJAK mengaku membunuh dua puluh empat tentara Iran dalam tiga serangan terhadap pangkalan militer di Maret 2006. Kantor berita resmi Iran juga melaporkan bahwa tiga tentara Garda Republik tewas dalam baku tembak di dekat perbatasan Irak pada akhir bulan Maret 2006. Iran telah mengecam PEJAK sebagai kelompok teroris dan telah menuduh AS mendanai PEJAK. Pada akhir Agustus 2007 dilaporkan bahwa tentara Iran telah menyeberangi perbatasan ke negara tetangga Irak dan di pegunungan Qandil yang terletak di Irak utara, di mana PEJAK memiliki kamp-kamp di perbatasan. Menurut US Department of Treasury berpendapat bahwa , kelompok Kurdi yang beroperasi di wilayah perbatasan antara Irak dan Iran, di bawah Executive Order 13224 telah dikendalikan oleh kelompok teroris Kongra-Gel (KGK, alias Partai Pekerja Kurdistan atau PKK). Kepemimpinan yang berwenang dalam PKK / KGK telah mengakui bahwa Iran-Kurdi sebagai anggota kelompok PKK yang akan memerankan dirinya sebagai pejuang kemerdekaan Kurdi yang bersekutu dengan PKK. PJAK diciptakan untuk menarik Iran Kurdi untuk bergabung bersama mereka. PKK secara resmi dilembagakan PJAK pada 2004 dan dipilih lima anggota PKK untuk melayani sebagai pemimpin PJAK, termasuk Haji Ahmadi, dan berafiliasi oleh anggota PKK

yang menjadi Sekretaris Jenderal di partai PJAK. pemimpin PKK juga memilih anggota komite sentral 40-orang dari PJAK. Pada April 2008, kepemimpinan PKK dikendalikan oleh PJAK dan dialokasikan personil untuk di tugaskan di kelompok-kelompok perbatasan. Secara terpisah, anggota PJAK telah melakukan kegiatan mereka sesuai dengan pesanan yang diterima dari para pemimpin senior PKK. Dalam satu contoh, sayap bersenjata PJAK, Angkatan Pertahanan Timur Kurdistan telah bertindak secara independen di Iran. pemimpin senior PKK juga ikut serta dalam menangani berbagai serangan yang dilakukan oleh PJAK, mengingat pejabat PJAK dan ikut bertanggung jawab untuk Irak utara juga. (globalsecurity.org, t.thn.)

Selain hubungan PKK di Iran dan Suriah, PKK Turki juga memiliki peran penting pada PKK Irak. Sejak pemberontakan Kurdi Irak di awal 1960-an, para pembuat kebijakan Turki telah merasakan otonomi Kurdi di Irak utara sebagai ancaman besar bagi keamanan nasional negara tersebut, kegelisahan Turki tentang perkembangan di Irak utara meningkat dengan awal perjuangan bersenjata Partai Buruh Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK) menyerang pertahanan Turki pada awal tahun 1980. Sejak itu, pembuat kebijakan Turki telah dirasakan Irak utara sebagai daerah untuk perlindungan di mana PKK berbasis dan Kurdi Irak dirasakan sebagai pelaku dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi PKK. Selanjutnya, sejak awal 1980-an, operasi lintas-perbatasan ke Irak utara telah menjadi aspek penting dari kebijakan kontra Turki dalam melawan PKK. Meskipun Turki membuat upaya untuk mencari aliansi dari para pemimpin Kurdi Irak dalam memerangi PKK di awal 1990-an, kedua pelaku Kurdi Turki dan Irak tidak bisa benar-benar mendapatkan lebih dari ketidakpercayaan mereka terhadap satu sama lain. Di sisi lain, kekhawatiran kebijakan Turki 'tentang kemungkinan negara Kurdi merdeka akan terus bertahan sebagai Kurdi Irak, secara bertahap membentuk pemerintah daerah di Irak utara dan menguatnya hubungan dengan PKK di Turki (hurriyetdailynews, 2002)

Dalam memerangi terorisme yang terjadi di Turki, pemerintah Turki telah melakukan serangkaian kerja sama bersama beberapa negara yang juga memiliki ancaman regional yang sama. Pada Pada bulan Agustus 2006 AS menunjuk Angkatan Udara pensiunan Jenderal Joseph Ralston, sebagai utusan khusus untuk

mengkoordinasikan dalam aksi bersama melawan PKK. Strategi Turki adalah untuk mengambil keuntungan dari retorika AS tentang perang melawan teror untuk membantu meyakinkan pemerintahan Bush bahwa PKK sebuah ancaman bukan hanya di Turki, tetapi juga Amerika Serikat dan membangun wilayah yang merdeka sebagai tujuan mereka. Ankara membawa tekanan AS untuk menanggung pada pemerintah Irak dan KRG, Irak dan Turki yang akan mengambil langkah-langkah untuk menghapus PKK dari wilayah Irak (Wright, 2007). Kemudian AS akan berbagi intelijen operasional terkait pemimpin PKK dan mengembalikan mereka ke Turki, dan berusaha untuk menutup kamp-kamp PKK dari berbagai perbatasan Irak Iran Turki dan Suriah, lalu memotong dukungan logistik dan mengkoordinasikan operasi militer Turki di Irak utara. Dan Kedua negara mengatur mekanisme bilateral untuk mengawasi kegiatan ini, yang terdiri dari Wakil Kepala Staf Umum Turki Ergin Saygun bersama, mitra AS Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal James E. Cartwright dan Komandan Jenderal Angkatan Multinasional US di Irak David Petraeus. Lalu Turki telah lama ditekan oleh Irak untuk menandatangani perjanjian kontraterorisme sebagian besar ditujukan untuk memerangi PKK, pada 28 September 2007, Irak menteri dalam negeri, Jawad alBoulani, dan rekannya Turki, Besir Atalay, menandatangani perjanjian kontra-terorisme di mana kedua negara berjanji untuk mencegah penggunaan wilayah mereka dengan PKK untuk tempat tinggal dan rekrutmen anggota yang di sinyalir menjadi anggota terorisme militan Kurdistan. Dan melarang baik dukungan logistik keuangan langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada PKK, lalu media dilarang menjadikan provokasi yang dapat mendorong kegiatan teroris. Irak dan Turki juga mencari dan menerima dukungan diplomatik dari negara-negara regional. Pada tanggal 17 september, selama kunjungan resmi, Presiden Suriah Bashar al-Assad telah terbuka mendukung hak Turki untuk tahap serangan lintas perbatasan terhadap pemberontak di Turki, kemudian Erdogan dan Presiden UK Gordon Brown, menandatangani kemitraan strategis kerjasama meliputi sejumlah isu, termasuk aksi bersama melawan apa yang disebut sebagai aktifitas teroris PKK. Menteri Luar Negeri Ali Babacan menerima pernyataan dukungan dari kepala Palestina, Israel, Yordania dan negara Arab untuk

melawan organisasi PKK. Pada kunjungan 27 November di Teheran, ia bertemu dengan para pejabat senior Iran, dan Presiden Mahmoud Ahmadi-Nejad menyatakan: "Iran memahami perjuangan Turki melawan terorisme dan siap untuk bekerja sama dengan Turki" . Akhirnya, pada tanggal 31 November, Ali Babacan ditandatangani kesepakatan dengan Liga Arab Sekretaris Jenderal Amr Moussa untuk kerjasama dalam keamanan, operasi perbatasan, operasi politik dan lingkungan, dan ekonomi. (Barzani, 2009)

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang berikut yang membahas tentang ancaman pemberontakan PKK terhadap stabilitas keamanan Turki, Turki telah mengalami eskalasi ancaman yang dilakukan oleh PKK yang terus menyerang sistem pertahanan Turki di berbagai kota. Dan Turki terlihat telah membuat suatu kebijakan dan kerja sama untuk mendukung pemerintah Turki atas menghadapi pemberontak kurdi atau PKK, maka dapat di rumuskan masalah **“Bagaimana upaya Turki dalam menangani ancaman militan Kurdistan (PKK) periode 2011-2015?”**

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana ancaman pemberontak militan kurdi atau partai pekerja Kurdistan (PKK) terjadi di Turki dan bagaimana dampak keamanan di Turki.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Turki terkait menangani pemberontak militan kurdi atau partai pekerja Kurdistan (PKK) di Turki.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data dalam ilmu hubungan internasional untuk memahami perihal ancaman dan dampak eskalasi penyerangan yang dilakukan oleh pemberontak militan

kurdi atau partai pekerja Kurdistan PKK di Turki lalu upaya pemerintah Turki terkait pemberontak militan kurdi atau PKK di Turki.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pengembangan studi hubungan internasional terkait pemberontak militan kurdi atau partai pekerja Kurdistan PKK di Turki dan upaya Turki terkait melawan terkait pemberontak militan kurdi atau partai pekerja Kurdistan PKK di Turki.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian ini penulis akan mencoba mencari kajian yang mana bisa menjadi acuan dalam mendukung penulisan penelitian yang serupa oleh peneliti bahas yaitu mengenai: Upaya Turki dalam menangani ancaman militant Kurdistan (PKK) periode 2011-2015

Dalam penelitian yang dikeluarkan oleh Europe Report N°219 yang berjudul "TURKEY: THE PKK AND A KURDISH SETTLEMENT" Berargumen bahwa Gerakan Kurdi secara teknis adalah "nasionalis", karena fokus utamanya adalah pada hak etnis nasional. Ocalan mendirikan PKK pada tahun 1978 pada ideologi Marxis Lennis dan sekarang lebih suka menyebut dirinya Gerakan Kebebasan Kurdi. Penggunaan kekerasan yang dilakukan PKK dengan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya dan mulai memberikan hak Kurdi. Beberapa tuntutan etnis Kurdi yang di perjuangkan yaitu gerakan Kurdi ingin pendidikan Kurdi penuh yang memungkinkan Kurdi untuk digunakan dalam pendidikan bilingual dari TK seterusnya dan memulai program dukungan negara untuk pelatihan guru dalam bahasa Kurdi. Tapi gerakan Kurdi tidak mencari penghapusan Turki sebagai bahasa resmi. Ia ingin membebaskan penggunaan Kurdi di semua aspek kehidupan masyarakat di daerah yang berbahasa Kurdi, dan pemerintah harus merencanakan cara untuk menemukan tempat sekolah, kota, lapangan dan kehidupan bisnis untuk Kurdi.

Dalam pencapaian suku Kurdi yang belum terpenuhi menjadikan terbentuknya militan Kurdi dalam menuntut hak-haknya yang mengakibatkan serangan terorisme

yang dilakukan oleh militan Kurdi di Turki. Eskalasi ancaman terorisme di Turki semakin meningkat dan lebih dari 700 orang tewas dalam empat belas bulan. Ini merupakan pencapaian korban tertinggi dalam tiga belas tahun terakhir. Pada tahun 2012 serangkaian serangan telah meningkat seperti bom bunuh diri, bentrokan berkepanjangan, penyerangan terhadap warga sipil dan penculikan yang dilakukan oleh militan Kurdistan di Turki tenggara. Namun opini publik meyakinkan bahwa Turki Kurdi hanya mencari negara independen meskipun sebagian besar hanya ingin hak penuh dalam Turki. Gejolak di negara tetangga Suriah, di mana kelompok PKK yang berafiliasi telah menguasai setidaknya satu daerah utama Kurdi dekat perbatasan dengan Turki yang membuat kekhawatiran Ankara.

Sejak skala besar pertempuran antara pemerintah Turki dengan PKK dilanjutkan pada musim panas 2011, Turki telah mengalami pertempuran terburuk sejak ditangkapnya dan dipenjarakannya pemimpin pemberontakan ini, Abdullah Ocalan pada tahun 1999. Menurut hitungan minimum informal statistik resmi dikelola oleh Crisis Group sejak 12 Juni 2011 pemilihan parlemen, 711 orang telah dibunuh pada pertengahan Agustus 2012, termasuk 222 tentara, polisi dan milisi penjaga desa, 405 pejuang PKK dan 84 warga sipil. Ini adalah empat kali lebih banyak kematian dibandingkan tahun 2009 dan jauh lebih dari angka tahunan tahun 2000-2004, ketika PKK melaksanakan gencatan senjata sepihak. PKK telah lama menggunakan metode teroris sebagai bagian dalam upaya untuk memaksa pemerintah untuk menganggapnya serius dan menjadi unsur dominan dari gerakan Kurdi. Dari beberapa serangkaian serangan yang paling mematikan adalah pada tanggal 20 Agustus 2012 ketika sebuah bom mobil dikendalikan oleh remote meledak dekat kantor polisi di provinsi Gaziantep di perbatasan Suriah, menewaskan seorang polisi dan delapan warga sipil, termasuk empat anak, dan melukai lebih dari 60 orang. PKK menolak bertanggung jawab, tapi ini tidak meyakinkan publik, media atau pemerintah.

Diikuti Pada tanggal 9 Agustus bom di letakan pada mobil militer di kota pesisir barat Foça menewaskan dua tentara. Di wilayah Semdinli provinsi Hakkari di perbatasan Iran Irak antara 23 Juli dan 12 Agustus, lalu PKK diduga mengelilingi

kota dan berjuang kembali dengan senjata berat dan 2.000 tentara dikirim ke daerah-daerah. PKK mengatakan bahwa mereka menerapkan taktik baru memegang wilayah di dalam negeri. dan itu menyebabkan salah satu paling konfrontasi berkelanjutan dan berdarah di wilayah Turki sejak konflik dimulai pada 1.984. pada penelitian ini berkesinambungan dengan apa yang penulis akan tulis sebagai acuan dasar latar belakang suku Kurdi membentuk organisasi PKK, dan sebagaimana besar eskalasi yang dilakukan oleh PKK terhadap keamanan Turki namun penelitian ini tidak membahas bagaimana upaya Turki terkait menanggulangi PKK. Penulis akan membahas bagaimana upaya Turki menangani PKK. (Report, 2012)

Dalam penelitian kongres yang berjudul “Turkey-U.S. Defense Cooperation: Prospects and Challenges” yang di tulis oleh Jim Zanotti, 2011 beragumen bahwa Kongres dan pemerintahan Obama sedang mencari untuk mengelola bilateral yang lama dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang berbasis kerja sama pertahanan dengan Turki pada perjalanan kebijakan luar negeri Turki yang lebih mandiri dan perubahan kondisi keamanan regional yang menciptakan tantangan baru bagi kedua negara. Menurut AS pentingnya Turki sebagai sekutunya bisa dibidang meningkat pada isu-isu penting global dalam wilayah sekitarnya yang meliputi Irak, Iran, Afghanistan, dan proses perdamaian Israel-Palestina. Lalu penulis dalam penelitian ini berasumsi bahwa kerjasama pertahanan AS dengan Turki cenderung memiliki bantalan yang signifikan pada kepentingan keamanan nasional US dan hubungan kerja sama dengan Turki yang saling menguntungkan. Lalu Jim Zanotti menambahkan bahwa Amerika Serikat menikmati keuntungan yang banyak dari kerja sama pertahanan dengan Turki, baik secara bilateral maupun dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang berasal dari awal Perang Dingin. Bagi kedua negara tersebut, kerja sama ini memiliki implikasi besar bagi prioritas keamanan nasional di Turki dan daerah sekitarnya terutama Timur tengah. Dalam hal ini AS memperluas kebijakan dalam kerja sama nya dengan Turki dalam aspek pertahanan pelebaran aliansi seperti persetujuan sistem pertahanan rudal yang bisa menampilkan sebuah stasiun radar dan elemen lainnya di Turki untuk melawan ancaman dari Iran dan di tempat lain. Kerja sama US dengan Turki memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas

dan ancaman mengurangi terorisme dari Irak dan Afghanistan melalui upaya kontraterorisme bersama, penggunaan pangkalan Turki dan wilayah untuk transportasi kargo, lalu kemungkinan penjualan senjata bersama, dan keterlibatan langsung dari pasukan non-tempur Turki di Afghanistan dan pelatihan.

Selanjutnya Kerjasama pertahanan AS Turki saat ini, dalam kepentingan baik secara bilateral maupun dalam NATO, mencerminkan kebersamaan dalam menjaga stabilitas regional, melalui kerjasama kontraterorisme terhadap PKK di Irak utara dan partisipasi Turki dalam misi ISAF di Afghanistan. Kekhawatiran tentang stabilitas juga memotivasi kesepakatan Turki pada prinsipnya untuk balistik pertahanan rudal (BMD) sistem NATO yang mengantisipasi potensi ancaman dari Iran. Meskipun produksi dan pengadaan sistem militer Turki lebih beragam dan otonom, Turki tampaknya menginginkan berbagai teknologi termasuk militer canggih tempur dan pesawat drone, helikopter, dan rudal. Sistem pertahanan Amerika Serikat tetap menjadi salah satu-satunya pemasok global. Untuk masa mendatang, Amerika Serikat memiliki kemungkinan memenuhi syarat untuk menyediakan berbagai macam senjata ke Turki dalam tujuan Turki untuk memperlihatkan kemampuan militernya.

Pada penelitian ini, penulis akan dijelaskan hubungan pertahanan AS Turki selalu mengalami perubahan, dan kurangnya dana Foreign Military Financing tahunan tidak menghalangi beberapa faktor yang mengedintifikasi pentingnya bagi kedua negara tersebut untuk bekerja sama pada isu-isu yang mempengaruhi keamanan regional dan global tanpa mengorbankan sisi kepentingan nasional negaranya. Dalam penelitian ini dijelaskan dimana peran AS dalam teknologi Turki untuk memerangi berbagai terorisme. Namun penelitian ini tidak menyinggung apa saja faktor yang menjadikan eskalasi tserangan yang dilakukan PKK. Dan penulis akan membahas apa saja faktor yang menjadikan PKK melakukan aksi terorisme di Turki. (Zanotti, 2011)

Lalu berikutnya penelitian yang berjudul "TURKEY AND PKK TERRORISM" yang ditulis oleh Tevfik Zehni, 2008. Zehni menuliskan bahwa Turki telah berjuang untuk menanggulangi ancaman Partai Pekerja Kurdistan (PKK) selama hampir tiga puluh tahun. Sebagai konsekuensi dari terorisme, Turki telah

menghabiskan sebagian besar anggaran untuk pertahanan teritorial selama setidaknya tiga dekade. Lebih dari 35,000 warga Turki tewas dalam kekerasan yang dilakukan oleh organisasi teroris ini. Turki telah menderita efek langsung dari konflik ini dalam bentuk hancurnya infrastruktur di zona konflik yang berlangsung. Konflik ini telah menanggung biaya rekonstruksi dan telah menyerap biaya pengeluaran keamanan tambahan. Turki juga telah merasakan efek tidak langsung terorisme, seperti kehilangan produksi, obstruksi transformasi, hilangnya pendapatan dari pariwisata dan mendapatkan kembali kepercayaan dari tourists. Akibatnya, terorisme PKK harus dilihat sebagai salah satu faktor utama yang membahayakan stabilitas ekonomi Turki dan hasil dalam masalah kehancuran sosial ekonomi dan frustrasi sosial.

Turki tidak bisa berkontribusi untuk stabilitas di kawasan nya, sementara stabilitas di negara nya terancam oleh terorisme PKK. Sejak Turki adalah satu-satunya negara di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim yang memiliki rezim politik yang demokratis, kemudian negara ini menjadi model bagi negara-negara non-demokratis di wilayah ini, lalu mencoba untuk menyelesaikan masalah terorisme yang diinduksi dalam wilayahnya. Selanjutnya, Turki telah dituduh oleh etnis minoritas kurdi dalam kebebasan individu, manusia dan hak-hak budaya. Dan mereka melakukan serangkaian serangan atas tuntutan nya terhadap pemerintah Turki. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terorisme PKK telah memiliki efek negatif pada proses liberalisasi dan konsolidasi demokrasi Turki.

Turki telah menerapkan kebijakan kontraterorisme untuk mengakhiri separatis gerakan ini. Meskipun Turki telah dituduh tergantung semata-mata pada kekuatan militer untuk melawan terorisme PKK, negara telah menerapkan kebijakan tambahan non-militer terhadap terorisme, dalam dimensi diplomatik, ekonomi dan kecerdasan. Namun demikian, Turki belum mampu menghancurkan PKK atau berhasil mengurangi percabangan dari organisasi itu sendiri tesis menggambarkan kesalahan kedua belah pihak dalam proses interaktif. Argumen utama dari tesis ini adalah bahwa Turki tidak berhasil menghancurkan PKK karena terjebak oleh taktik PKK, yang bertujuan untuk membuat musuh bereaksi berlebihan dan memaksa musuh untuk menerapkan langkah yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan

kontraproduktif. Oleh karena itu, tesis ini berpendapat bahwa PKK telah berhasil menciptakan kesenjangan antara negara Turki dan warganya dengan asal Kurdi. Akibatnya, PKK telah berhasil bertahan selama tiga puluh tahun dengan meyakinkan ini Kur di Turki terasing untuk secara diam-diam mendukung kelompok teroris. Dalam tulisan ini menjadi acuan penulis bagaimana dampak PKK terhadap Turki, namun tidak menyinggung bagaimana besar eskalasi yang timbulkan oleh serangan PKK terhadap stabilitas keamanan Turki. Penulis akan menambahkan bagaimana eskalasi ancaman PKK terhadap keamanan Turki.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Konsep Keamanan Nasional

Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”. Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya, maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. (Brauch, 2011)

Keamanan Nasional yang merupakan elemen penting bagi setiap negara dimana negara harus memperjuangkan kepentingan Nasional yang termasuk melindungi warga negaranya yang mendapatkan ancaman dari dalam maupun luar Negeri.

I.6.2 Konsep Kerjasama Pertahanan

Dalam sebuah Kerjasama Pertahanan untuk mewujudkan rasa aman, negaranegara cenderung bekerjasama dalam mewujudkan keamanan bersama (Collective Security) di suatu kawasan untuk menghadapi musuh bersamamen. Menurut Ernst Haas, Collective Security adalah sistem global atau regional dimana semua negara anggota saling menjamin satu sama lain bahwa siapapun yang mengganggu perdamaian akan dihadapi bersama. Namun dalam kesempatan itu tidak ada negara yang disebut sebagai lawan bersama. Lawan itu bisa siapa saja. Siapa saja bisa jadi calon agresor (Mohtar Mas'ood, Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi, hal. 161).

Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari diplomasi pertahanan Turki di kawasan. Terkait hal tersebut, sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama pertahanan akan mempengaruhi terhadap diplomasi pertahanan. Kerjasama pertahanan Turki yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan memiliki cakupan pada CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution. Hal itu menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan Turki tidak ditujukan untuk menghadapi satu atau beberapa negara tertentu yang dianggap sebagai lawan, akan tetapi ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan. Sebab isu-isu CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution pada dasarnya sangat terkait dengan stabilitas kawasan. Dalam kondisi saat ini akan diberikan gambaran tentang kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral dalam bentuk operasi, latihan, pendidikan, pengadaan alutsista maupun industri pertahanan.

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Turki, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Penggunaan kekuatan pertahanan, selain untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri, juga untuk tugas-tugas internasional. Kerja sama pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sngat

penting. Kerjasama internasional yang tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Turki. Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Turki. Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan pertimbangan kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan tidak saling intervensi.

Kerjasama Internasional di bidang pertahanan merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Turki sebagai salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa - bangsa lain. Keterlibatan Turki secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara di dunia yang dilanda konflik.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

Metodologi yaitu prosedur untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan suatu fenomena. Dalam hal ini metodologi penelitian meliputi

memperkenalkan suatu perspektif, untuk memahamai perkembangan ilmu, kerangka konseptual, pendekatan, dan teori untuk melakukan suatu penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian yang diambil adalah kualitatif yang Berdasarkan pada metodologi ini penulis melakukan analisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menjelaskan bahwa Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

1. Data primer

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen atau pun situs resmi pemerintah Turki dan situs resmi pemerintahan Amerika Serikat.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data ini melalui studi dengan buku-buku yang berkesinambungan dengan ancaman terorisme PKK, buku mengenai serta artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, laporan tentang ancaman PKK dan upaya Turki melawan terorisme militan Kurdi di Turki sebagai bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

I.8.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis menggunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

I.9 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan makalah, penulis menguraikan penulisan tersusun secara sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II ESKALASI PEMBERONTAKAN MILITAN KURDI ATAU PKK DI TURKI

Bab ini akan membahas tentang sejarah pemberontakan militan Kurdi atau PKK di Turki, faktor yang melatarbelakangi ancaman PKK di Turki, dan eskalasi ancaman militan kurdistan PKK di Turki, dan kondisi keamanan Turki.

BAB III UPAYA PEMERINTAHAN TURKI DALAM MENANGANI PEMBERONTAKAN MILITAN KURDISTAN PKK.

Bab ini berisi tentang bagaimana upaya internal dan eksternal Turki terkait menangani ancaman pemberontakan militan kurdi PKK di Turki.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang di bahas dalam penelitian upaya Turki terkait menangani pemberontakan militan kurdi PKK di Turki terhadap stabilitas keamanan Turki periode 2011-2015, sedangkan saran merupakan ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam menemukan solusi atas masalah yang akan dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.